

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



L P P D

(LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Urusan yang dilaksanakan :
 1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 2. Urusan Pertanahan
 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- A. Jumlah Program sebanyak 9 program dan Kegiatan sebanyak 46 kegiatan
 Rincian Program dan Kegiatan

No	Urusan, Program dan Kegiatan		Belanja Langsung									Tingkat Capaian (%)	
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal		Total
(4) URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			382.975.000	3.616.702.300	153.600.000	11.989.051.350	16.142.328.650	302.413.000	2.731.512.863	153.600.000	11.818.746.862	14.858.822.725	92,05
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		207.500.000	648.056.300	-	711.840.000	1.567.396.300	206.650.000	528.931.966	-	670.681.080	1.406.263.046	89,72
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		78.700.000			78.700.000		33.264.416			33.264.416	42,27
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	206.600.000				206.600.000	206.350.000				206.350.000	99,88
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	900.000	76.664.800			77.564.800	300.000	76.654.400			76.954.400	99,21
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		33.137.900			33.137.900		33.135.800			33.135.800	99,99
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		23.608.600			23.608.600		20.085.900			20.085.900	85,08
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		9.192.000		45.000.000	54.192.000		8.929.000		43.860.080	52.789.080	97,41
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				666.840.000	666.840.000				626.821.000	626.821.000	94,00
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman		46.620.000			46.620.000		45.027.500			45.027.500	96,58
	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		230.558.000			230.558.000		217.811.950			217.811.950	94,47
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		149.575.000			149.575.000		94.023.000			94.023.000	62,86
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6.900.000	815.001.250	153.600.000	1.710.801.650	2.686.302.900	6.900.000	234.127.461	153.600.000	2.214.882.932	2.462.060.393	91,65
	1	Pembangunan Rumah Dinas		753.491.250		890.596.650	1.644.087.900		191.242.250		1.252.342.250	1.443.584.500	87,80
	2	Pengadaan Meubiler				150.650.000	150.650.000				150.436.000	150.436.000	99,86
	3	Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan				200.000.000	200.000.000				198.640.350	198.640.350	99,32
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	900.000	830.000	147.450.000	201.555.000	350.735.000	900.000	830.000	147.450.000	347.605.000	349.335.000	99,60
	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	6.000.000	53.730.000		68.000.000	127.730.000	6.000.000	40.467.821		67.318.982	113.786.803	89,08
	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor		6.950.000	6.150.000		13.100.000		1.587.390	6.150.000		7.737.390	59,06

No	Urusan, Program dan Kegiatan		Belanja Langsung										Tingkat Capaian (%)
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	
	7	Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Dinas				200.000.000	200.000.000				198.540.350	198.540.350	99,27
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	100,00
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		3.000.000			3.000.000		3.000.000			3.000.000	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaur		-	45.000.000	-	-	45.000.000	-	44.300.000	-	-	44.300.000	98,44
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		45.000.000			45.000.000		44.300.000			44.300.000	98,44
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		9.800.000	120.192.250	-	-	129.992.250	9.788.000	95.556.650	-	-	105.344.650	81,04
	1	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	4.800.000	66.055.000			70.855.000	4.800.000	59.325.400			64.125.400	90,50
	2	Penyusunan Perencanaan Anggaran	5.000.000	54.137.250			59.137.250	4.988.000	36.231.250			41.219.250	69,70
6	Program Pengembangan Perumahan		142.375.000	1.400.604.450	-	1.599.860.000	3.142.839.450	62.675.000	1.304.913.436	-	1.096.076.650	2.463.665.086	78,39
	1	Pematangan Lahan lokasi Rumah Tapak				1.180.860.000	1.180.860.000				679.676.550	679.676.550	57,56
	2	Validasi Data Rumah Tidak Layak huni	3.600.000	125.828.300			129.428.300	3.600.000	114.836.150			118.436.150	91,51
	3	Pembangunan jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)				219.000.000	219.000.000				217.659.750	217.659.750	99,39
	4	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	39.000.000	701.000.000			740.000.000	33.600.000	690.042.500			723.642.500	97,79
	5	Bantuan Jamban (WC) Masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan	14.175.000	358.811.250			372.986.250	14.175.000	358.811.250			372.986.250	100,00
	6	Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2017	85.300.000	165.264.900			250.564.900	11.300.000	141.223.536			152.523.536	60,87
	7	Pematangan Lahan Lokasi Pendaratan Terbang Layang				200.000.000	200.000.000				198.740.350	198.740.350	99,37
	8	Feseability Study Rumah Khusus Kawasan Nelayan Kecamatan Koto XI Tarusan	300.000	49.700.000			50.000.000					-	-
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan		-	152.325.000	-	7.966.549.700	8.118.874.700	-	117.845.300	-	7.837.106.200	7.954.951.500	97,98
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman				1.044.655.650	1.044.655.650				1.024.421.750	1.024.421.750	98,06
	2	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan		152.325.000			152.325.000		117.845.300			117.845.300	77,36
	3	Pembangunan Drainase Kec. Koto XI Tarusan				149.010.000	149.010.000				147.480.750	147.480.750	98,97
	4	Pembangunan Drainase Kec. Bayang				600.077.050	600.077.050				594.774.300	594.774.300	99,12
	5	Pembangunan Drainase Kec. IV Jurai				1.046.591.700	1.046.591.700				1.036.032.950	1.036.032.950	98,99

No	Urusan, Program dan Kegiatan		Belanja Langsung									Tingkat Capaian (%)	
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal		Total
	6	Pembangunan Drainase Kec. Batang kapas				499.131.000	499.131.000				487.940.000	487.940.000	97,76
	7	Pembangunan Drainase Kec. Sutera				1.800.000.000	1.800.000.000				1.758.137.900	1.758.137.900	97,67
	8	Pembangunan Drainase Kec. Lengayang				1.527.936.850	1.527.936.850				1.504.932.200	1.504.932.200	98,49
	9	Pembangunan Drainase Kec. Ranah Pesisir				299.147.450	299.147.450				298.400.450	298.400.450	99,75
	10	Drainase Timbulun kenag. Rawang - Timbulun (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)				150.000.000	150.000.000				148.297.650	148.297.650	98,87
	11	Kelanjutan Drainase se - Kota Painan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)				200.000.000	200.000.000				194.959.350	194.959.350	97,48
	12	Pembuatan Drainase Koto Nan Tigo Surantiah Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)				150.000.000	150.000.000				149.222.350	149.222.350	99,48
	13	Drainase Lubuak Buaya Kenag. Air Haji Tenggara Kec. Linggosari Baganti Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)				100.000.000	100.000.000				97.635.600	97.635.600	97,64
	14	Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh				200.000.000	200.000.000				198.355.600	198.355.600	99,18
	15	Pengadaan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan)				200.000.000	200.000.000				196.515.350	196.515.350	98,26
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya		13.400.000	420.523.050	-	-	433.923.050	13.400.000	390.843.050	-	-	404.243.050	93,16
	1	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	13.400.000	420.523.050			433.923.050	13.400.000	390.843.050			404.243.050	93,16
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		3.000.000	12.000.000	-	-	15.000.000	3.000.000	11.995.000	-	-	14.995.000	99,97
	1	Pelaksanaan Promosi Wisata	3.000.000	12.000.000			15.000.000	3.000.000	11.995.000			14.995.000	99,97
J U M L A H			382.975.000	3.616.702.300	153.600.000	11.989.051.350	16.142.328.650	302.413.000	2.731.512.863	153.600.000	11.818.746.862	14.858.822.725	92,05

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas, pekerjaan Pematangan Lahan Rumah Dinas Bupati tidak dilaksanakan karena lahan belum bebas.

b. Kegiatan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak, pekerjaan pematangan lahan lokasi Rumah Tapak Kec. Sutura dan Lengayang, beserta Dokumen lingkungannya tidak dilaksanakan karena lahan belum bebas

c. Feseability Study Rumah Khusus Kawasan Nelayan Kecamatan Koto XI Tarusan, karena lahan belum bebas

2. Solusi

F. Hal-hal yang perlu dilaporkan

SDM Pendukung Program dan Kegiatan:

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2017

No	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN															
	Struktural															
1	MUKHRIDAL, SH/ 19640128 199309 1 001				V		V					V			V	
2	SUGENG TERISNO, SH/ 19630715 198303 1 007				V		V					V				V
3	ROLI BUCHARI, ST, MT/ 19750417 200501 1 013					V	V				V					
4	IRFAN HS, SH/ 19670111 198612 1 001				V		V				V					V
5	RUDI ANWAR, ST/ 19740129 200804 1 001				V		V				V					
6	AHMAD YANI, SH/ 19650902 198603 1 005				V		V				V					V
7	INDRA BAKTI, SE/ 19600620 198503 1 013				V		V				V					V
8	DEDY MIRZA YULIATO, ST, MT/ 19740707 200312 1 004					V	V				V					
9	POPPY MAYASARI, ST/ 19821221 200902 2 008				V			V			V					V
10	Drs. IRWANSYAH/ 19670630 200801 1 006				V		V				V					
11	IKHWAN WILDANI, ST/ 19760827 200801 1 015				V		V				V					
12	PITPUSPITA, ST/ 19771122 200902 2 002				V			V			V					
13	EDRUSPARDI, ST/19830412 201001 1 039				V		V				V					
14	ARIF NURMAN FLORISA, ST/ 19830624 201001 1 023				V		V				V					
15	HENDRA ARMAN, ST/ 19801125 201101 1 007				V		V				V					

No	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
16	ANDI YUSRAPEL SABIR, SIP, MM/ 19740410 200604 1 002					V		V			V					
17	MARNI, SH/ 19621009 198503 2 003				V			V			V					
18	ZULMIRA, SH/ 19790808 101407 2 005				V			V			V					
19	DEVI MELVIRA/ 19820810 201001 2 012		V					V		V						
20	YUSMADI MARTIAS, ST/ 19690617 201407 1 001				V		V				V					
21	JUFRI/ 19651231 200312 1 026		V				V			V						
22	RONI PASLAH/ 19781020 200701 1 009		V				V			V						
23	INDRA GUSMADI, ST/ 19760810 200604 1 004				V		V				V					
24	YOGI QADARMINTO, ST/ 19880510 201001 1 006				V		V				V					
25	DESNAWATI/ 19641230 200312 2 002		V					V		V						
26	YOHANDRA/ 19801119 201407 1 002		V				V			V						
	Total		5		18	3	19	7		5	19	2			1	5

Painan, Februari 2018
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

Lampiran III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (Th.2017)	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3		5	6	7	8	9
	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar daerah		Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak 1 MOU	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak 1 MOU MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Dirjen PU Cipta Karya, Dinas PU Tarkim Propinsi Sumatera Barat Ttg kerjasama Pembangunan Daerah Bidang Cipta Karya	1 MOU	
	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan		Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2017	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak Yang terdiri dari :	 penghargaan	

1. SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Urusan yang dilaksanakan :
 1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 2. Urusan Pertanahan
 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I. URUSAN PERTANAHAN

- A. Jumlah Program sebanyak 2 program dan Kegiatan sebanyak 8 kegiatan
 Rincian Program dan Kegiatan

No	Urusan, Program dan Kegiatan		Belanja Langsung									Tingkat Capaian (%)	
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal		Total
(4) URUSAN PERTANAHAN			27.000.000	576.350.100	-	11.203.321.250	11.806.671.350	25.800.000	375.990.550	-	2.838.470.000	3.240.260.550	27,44
10	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		23.400.000	471.243.700	-	11.203.321.250	11.697.964.950	22.200.000	291.404.150	-	2.838.470.000	3.152.074.150	26,95
	1	Perencanaan Pengadaan Tanah				100.314.650	100.314.650				88.070.950	88.070.950	87,79
	2	Persiapan Pengadaan Tanah				111.977.300	111.977.300				106.257.250	106.257.250	94,89
	3	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	23.400.000	229.380.000		10.880.929.300	11.133.709.300	22.200.000	116.080.000		2.642.837.800	2.781.117.800	24,98
	4	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah				110.100.000	110.100.000				1.304.000	1.304.000	1,18
	5	Pengadaan Pilar Batas Tanah		97.090.250			97.090.250		85.913.700			85.913.700	88,49
	6	Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		50.000.000			50.000.000		50.000.000			50.000.000	100,00
	7	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah		94.773.450			94.773.450		39.410.450			39.410.450	41,58
11	Program Penyelesaian Konflik-Konflik		3.600.000	105.106.400	-	-	108.706.400	3.600.000	84.586.400	-	-	88.186.400	81,12
	1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	3600000	105.106.400			108.706.400	3600000	84.586.400			88.186.400	81,12
J U M L A H			27.000.000	576.350.100	-	11.203.321.250	11.806.671.350	25.800.000	375.990.550	-	2.838.470.000	3.240.260.550	27,44

- B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
- D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)
- E. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah pekerjaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Bupati, karena salah seorang pemilik lahan belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya kepada pemerintah daerah.Pekerjaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sentral IKM Perikanan karena tanah masih dalam sengketa kepemilikan. Pekerjaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SLB Kec. Koto XI Tarusan karena tidak cukup waktu untuk memproses. Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan, karena sampai akhir tahun
 2. Solusi
- F. Hal-hal yang perlu dilaporkan

1. SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urusan yang dilaksanakan :

1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Jumlah Program sebanyak 1 program dan Kegiatan sebanyak 1 kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan

No	Urusan, Program dan Kegiatan		Belanja Langsung									Tingkat Capaian (%)	
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal		Total
(3) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	-	-	242.462.500	242.462.500	96,99
12	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	-	-	242.462.500	242.462.500	96,99
	1	Pengadaan Jalan Lingkungan				250.000.000	250.000.000				242.462.500	242.462.500	96,99
J U M L A H			-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	-	-	242.462.500	242.462.500	96,99

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

2. Solusi

F. Hal-hal yang perlu dilaporkan

Tabel 1.1.3 Luas Daerah Menurut Kecamatan, 2016
Table Area of Wet Land by Sub-District, 2016

Kecamatan/ Sub-District		Luas (Km ²)/ Area (Km ²)	Persentase/ Percentage
(1)		(2)	(3)
1	Silaut	365.50	6.36
2	Lunang	564.00	9.81
3	Basa Ampek Balai Tapan	300.93	5.23
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	376.57	6.55
5	Pancung Soal	426.10	7.41
6	Airpura	314.00	5.46
7	Linggo Sari Baganti	315.41	5.49
8	Ranah Pesisir	564.39	9.82
9	Lengayang	590.60	10.27
10	Sutera	445.65	7.75
11	Batang kapas	359.07	6.24
12	IV Jurai	373.80	6.50
13	Bayang	77.50	1.35
14	IV Nagari Bayang Utara	250.74	4.36
15	Koto XI Tarusan	425.63	7.40
Kab. Pesisir Selatan		5 749.89	100.00

Sumber/Source: Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 138/341/KPTS/BPT-PS/2012 / Decision Regents Pesisir Selatan No. 138/341/KPTS/BPT-PS/2012



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN LOKASI PENANGANAN LINGKUNGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan masih terdapat kawasan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis Kawasan yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani. Dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan/stimulan dan kemudahan pada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran kesatu merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal dilingkungan perumahan dan permukiman kumuh tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014, dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan,
Pada tanggal September 2014
BUPATI PESISIR SELATAN

H. NASRUL ABIT

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kepala Dinas PU Prov. Sumbar di Padang
3. Bapak Kepala Bappeda Prov. Sumbar di Padang
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : September 2014

Tentang : Penetapan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Nagari	Kampung	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Km ²
1.	Koto XI Tarusan	Sungai Pinang	Koto dan Pasa	1.521	29,15
2.	Koto XI Tarusan	Mandeh	Taratak, Tengah dan Baru	1.562	6,48
3.	Bayang	Api-Api Pasar Baru	Muaro Api-Api, Pasar Api-Api dan Kenanga Api-Api	2.570	2,75
4.	Bayang	Pasar Baru	Pasar Baru, Lubuk Kumpai dan luhung	5.104	2,74
5.	Bayang Utara	Limau Gadang Pancung Taba	Limau-Limau dan Ngalau Gadang	1.432	60,62
6.	IV Jurai	Salido	Laban Salido, Balai Lamo Salido, Kampung Lua, Koto Salido dan Pasar Salido	8.399	11,90
7.	IV Jurai	Painan Selatan Painan	Painan Selatan, Carocok Painan dan Sungai Nipah	5.461	8,49
8.	IV Jurai	Sago Salido	Karang Sago, Baru Sago dan Sianik Sago	5.153	9,90
9.	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	Sapan, Anakan, Teluk Kasai dan Sungai Bungin	5.781	4,50

10.	Batang Kapas	Taluk	Limpaso, Pasar Taluk dan Ujung Batu	2.945	22,41
11.	Sutera	Surantih	Pasar Surantih dan Sungai Sirah	8.887	26,78
12.	Sutera	Ganting Mudik Utara Surantih	Ampalu dan Kayu Aro	2.537	49,36
13.	Lengayang	Kambang Utara	Lubuk Sarik, Kampung Akad, Kampung Baru, Pasih Laweh, Ganting Kubang, Padang Panjang I, Padang Panjang II dan Kambang Harapan	10.688	96,66
14.	Lengayang	Kambang	Koto Baru, Sumbaru, Medan Baik, Kayu Kalek, Limau Manih Kulam, Nyiur Gading, Talang Tan Saidi dan Padang Limau Manih	6.912	73,50
15.	Lengayang	Lakitan	Pasar Lakitan, Gurun Panjang, Daratan Marantih dan Tarok	5.401	69,83
16.	Ranah Pesisir	Nyiur Melambai Pelangai	Air Tambang dan Sumedang	4.313	16,90
17.	Linggo Sari Baganti	Muaro Gadang Air Haji	Muaro Gadang Timur dan Muaro Gadang Barat	1.963	16,50
18.	Linggo Sari Baganti	Rantau Simalenang Air Haji	Bukit Kaciak, Koto langang, Danau, Sikabu dan Luar Parit	4.449	18,67

19.	Linggo Sari Baganti	Pungasan Utara	Bukit Putus Luar dan Tandikat Air Jambu	4.091	6,56
20.	Air Pura	Tanah Bekali Inderapura	Air Batu dan Tanah Bakali	3.325	31,00
21.	Pancung Soal	Muaro Sakai Inderapura	Lubuk Gedang Lamo, Tanjung Medan, Muaro Sakai dan Muaro Gedang	3.669	31,00
22.	Ranah Ampek Hulu	Sungai Gambir Sako Tapan	Sako dan Jangki Ayam	1.078	170,20
23.	Lunang	Pondok Parian Lunang	Kumbang Gedang dan Bukit Tapus	1.122	17,60
24.	Silaut	Sambungo	Tanjung Sari, Silaut IV dan Sambungo	1.029	16,90

Ditetapkan di Painan,
Pada Tanggal September 2014
BUPATI PESISIR SELATAN

H. NASRUL ABIT